

1.1 Latar Belakang

Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate merupakan salah satu wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*Good Governance*) yang menjadi prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Pertanggungjawaban dimaksud dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif, bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Good Governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan tantangan tersendiri.

Melihat perkembangan yang terjadi sampai dengan saat ini, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar termasuk pula keharusan pemerintah untuk terus melakukan regulasi dan restrukturisasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif dan kehidupan masyarakat yang lebih nyaman dan sejahtera.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa salah satu asas penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan diberlakukannya regulasi terbaru yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Di samping berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance, dalam perspektif yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 selain mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menyajikan informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur kepada publik juga mendorong Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk terus berupaya dalam menghasilkan capaian kinerja yang lebih efektif dan efisien.

Bertitik tolak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 dan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka LKIP Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Flores Timur kepada Presiden ini, telah disusun dan dikembangkan sesuai Peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan capaian program/kegiatan di tahun 2016.

Dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKIP, yaitu :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur;

9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
10. Perjanjian Kinerja Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016.

1.2 Gambaran Umum Kabupaten Flores Timur

1. Aspek Geografi dan Demografi

1.1 Aspek Geografi

Kabupaten Flores Timur adalah Kabupaten Kepulauan dan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan terletak antara $08^{\circ} 04' - 08^{\circ} 40' \text{ LS}$ dan $122^{\circ} 38' - 123^{\circ} 57' \text{ BT}$, dengan luas wilayah seluruhnya $5.983,38 \text{ km}^2$ terdiri dari luas daratan $1.812,85 \text{ km}^2$ (31 persen luas wilayah) yang tersebar pada 3 pulau besar dan 27 pulau kecil serta luas lautan $4.170,53 \text{ km}^2$ (69 persen luas wilayah) dan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Flores
- Sebelah Selatan : Laut Sawu
- Sebelah Barat : Kabupaten Sikka
- Sebelah Timur : Kabupaten Lembata

Luas daratan Kabupaten Flores Timur terdiri dari :

- Flores Timur Daratan : $1.066,87 \text{ Km}^2$
- Pulau Adonara : $529,75 \text{ Km}^2$
- Pulau Solor : $226,34 \text{ Km}^2$

Secara Administrasi Pemerintahan Kabupaten Flores Timur terdiri dari 19 Kecamatan, 21 Kelurahan dan 229 Desa.

Sebaran Kecamatan, Desa/Kelurahan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Jumlah Desa dan Luas Kecamatan di Kabupaten Flores Timur
Tahun 2015

Pulau	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas Daerah Area (Km^2)	Luas (%)
	1. Wulanggitang	11	-	225,85	12,46
	2. Titehena	14	-	154,84	8,54
	3. Tanjung Bunga	16	-	257,57	14,21
	4. Ile Mandiri	8	-	72,76	4,01
	5. Larantuka	2	18	48,91	2,70
	6. Demon Pagong	7	-	85,40	4,71
	7. Ile Bura	7	-	118,32	6,53
	8. Lewolema	7	-	92,84	5,12

Flores Timur Daratan	72	18	1.056,49	58,28
9. Solor Barat	14	1	128,20	7,08
10. Solor Timur	17	-	66,56	3,68
11. Solor Selatan	7	-	31,58	1,74
Solor	38	1	226,34	12,50
12. Adonara Barat	18	-	79,71	4,40
13. Wotan Ulumado	12	-	86,31	4,76
14. Adonara Timur	19	2	91,06	5,02
15. Ile Boleng	21	-	49,30	2,72
16. Witihamia	16	-	79,43	4,38
17. Klubagolit	12	-	44,41	2,45
18. Adonara Tengah	13	-	42,73	2,36
19. Adonara	8	-	56,80	3,13
Adonara	119	2	529,75	29,22
Flores Timur	229	21	1.812,85	100

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2014

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Kecamatan Tanjung Bunga mempunyai wilayah paling luas yaitu 257,57 km² sedangkan jumlah Desa yang terbanyak terdapat di Kecamatan Adonara Timur dengan 19 Desa dan 2 Kelurahan serta Kecamatan Ile Boleng dengan 21 Desa.

1.2 Aspek Demografis

1.2.1 Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Flores Timur tahun 2016 sebanyak 306.482 jiwa yang mendiami wilayah seluas 1.812,85 km² dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 169,06 orang per km². Dengan kepadatan sebesar ini, sebenarnya Flores Timur belum menghadapi masalah kependudukan. Akan tetapi kalau dilihat dari potensi alam yaitu lahan kering yang tidak subur, lahan sawah yang tidak berpengairan sedikit lahan sawah yang berpengairan maka Flores Timur juga menghadapi masalah kependudukan.

Dilihat dari Jenis Kelamin, penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Perbandingan luas wilayah, jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Menurut Kecamatan 2016

KECAMATAN	Luas Wilayah (Km ²)	Jenis Kelamin		Total	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
		Laki-Laki	Perempuan		
Wulanggitang	225,85	6 640	6 873	13 513	60,00
Titehena	154,84	5 715	5 970	5 970	39,00
Ile Bura	118,32	3 017	3 278	6 295	69,86
Tanjung Bunga	257,57	6 290	6 405	12 695	53,20
Lewolema	92,84	4 029	4 248	8 277	89,15
Larantuka	48,91	21 165	21 650	42 815	875,38
Ile Mandiri	72,76	4 680	4 851	9 531	130,99
Demon Pagong	85,40	2 102	2 314	4 416	51,70
Solor Barat	128,20	4 402	5 194	9 596	74,85
Solor Selatan	31,58	2 208	2 849	5 057	160,13
Solor Timur	66,56	6 120	7 099	13 219	198,60
Adonara Barat	79,71	6 974	7 192	14 166	177,71
Wotan Ulumado	86,31	3 905	4 185	8 090	93,73
Adonara Tengah	42,73	5 482	5 857	11 339	265,36
Adonara Timur	91,06	13 136	14 764	27 900	306,39
Ile Boleng	49,30	6 777	8 270	15 047	305,21
Witihama	79,43	6 597	7 913	14 510	186,67
Klubagolit	44,41	4 819	5 696	10 515	236,77
Adonara	56,80	4 721	5 502	10 223	179,98
FLORES TIMUR	1.812,85	118 779	130 110	248 889	137,29

Sumber : BPS Kab. Flores Timur, 2016

Ket. : *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Flores Timur adalah 248 889 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 118 779 jiwa dan perempuan 130 110 jiwa. Rasio jenis kelamin Kabupaten Flores Timur adalah 0,91. Ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Jika dikaitkan dengan kelompok umur nampak bahwa proporsi penduduk lebih besar pada kelompok umur produktif, sehingga untuk perencanaan pembangunan kependudukan lebih diutamakan pada bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Larantuka dengan 42 815 jiwa dan jumlah penduduk terkecil di Kecamatan Demon Pagong dengan jumlah 4 416 jiwa.

2. Aspek Ekonomi

2.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. PDRB memegang peranan penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Flores Timur ditandai dengan adanya perubahan atau pergeseran dalam kontribusi sektor ekonomi terhadap produk daerah sebagai akibat terjadinya pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian (primer) ke sektor industri (sekunder), kemudian ke arah sektor jasa-jasa (tersier). Hal ini merupakan sesuatu yang sangat wajar dan biasa terjadi di daerah yang sedang membangun dan berkembang seperti Kabupaten Flores Timur. Pergeseran dan transformasi sektor ekonomi telah membawa berbagai implikasi. Salah satu implikasi tersebut adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah; Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan; Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya. Tabel 1.3 menunjukkan bahwa perkembangan PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha dari tahun 2012-2015 pada semua sektor mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel 1.3. PDRB Flores Timur Atas Dasar Harga Berlaku
2012 – 2015

SEKTOR	2012	2013	2014 *)	2015 **)	Pertumb. (%)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	820.989	906.250,60	1.005.132	1.134.328	12,85
Pertambangan dan Penggalian	23.587,10	27.213,84	31.944,52	39.952	25,06
Industri Pengolahan	26.562,55	28.665,99	30.738,27	33.170,14	7,91
Pengadaan Listrik dan Gas	1.448,03	1.527,64	1.831,69	2.153,09	17,54
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	848,16	984,79	1.059,36	1.162,07	9,70
Konstruksi	153.536,08	161.749,62	171.217,12	181.564,86	6,04
Perdagangan, Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	231`.393,44	258.329,24	290.219,01	323.568,20	11,50
Transportasi dan Pergudangan	164.277,45	180.240,63	200.623,02	221.634,91	10,47
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.586,02	2.946,72	3.204,29	3.619,78	13,00
Informasi dan Komunikasi	146.347,86	157.861,30	167.865,70	175.905,42	4,80
Jasa Keuangan dan Asuransi	118.456,91	128.914,75	137.664,65	150.862,37	9,58
Real Estate	94.352,13	105.247,39	116.795,01	129.749,56	11,09
Jasa Perusahaan	4.054,12	4.479,50	5.080,21	5.802,18	14,21
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	456.128,71	497.102,15	542.981,00	588.478,52	8,37
Jasa Pendidikan	422.348,46	494.476,00	560.906,45	619.679,74	10,47
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	70.454,31	74.669,57	78.795,48	85.465,51	8,46
Jasa Lainnya	140.559,49	156.025,93	170.664,80	187.617,56	9,93
PDRB TANPA MIGAS	2.877.969,44	3.186.786,57	3.516.772,30	3.884.714,06	10,46

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2016 Ket : *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Kontribusi di Bidang Pertanian masih dominan disusul Bidang Jasa Pendidikan serta Bidang Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib, terlihat bahwa kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB di Kabupaten Flores Timur setiap tahun mengalami peningkatan. Akan tetapi tingkat pertumbuhan dari sektor pertanian berada di bawah rata-rata pertumbuhan PDRB. Laju pertumbuhan tertinggi pada Sektor Pertambangan dan Penggalian yakni mencapai 25,06 %, disusul Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 17,54 % dan Sektor Jasa dan Perusahaan sebesar 14,21 %. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah peningkatan jumlah produksi (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh lapangan usaha serta peningkatan tersebut dipengaruhi oleh perubahan harga yang terjadi setiap tahun. Selanjutnya

perkembangan PDRB di Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Konstan dapat dilihat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1.4 PDRB Flores Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2012-2015

SEKTOR	2012	2013	2014 *)	2015 **)	Pert mbh %
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	731.783,81	752.823,31	771.316,95	797.145,47	3.35
Pertambangan dan Penggalian	21.776,29	23.755,83	25.699,24	27.916,77	8.63
Industri Pengolahan	24.552,92	25.8895,00	27.186,31	28.796,24	5.92
Pengadaan Listrik dan Gas	1.330,88	1.438,57	1.590,61	1.736,65	9.18
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	763,87	823,42	848,03	883,66	4.20
Konstruksi	147.401,06	153.548,81	160.773,90	167.816,81	4.38
Perdagangan, Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	203.548,24	214.442,24	222.400,98	232.852,22	4.70
Transportasi dan Pergudangan	142.761,67	149.054,51	157.972,12	166.074,33	5.13
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.152,34	2.264,15	2.349,74	2.456,59	4.55
Informasi dan Komunikasi	133.334,56	140.899,16	147.827,20	155.788,94	5.39
Jasa Keuangan dan Asuransi	105.971,91	113.856,79	120.623,36	128.192,88	6.28
Real Estate	83.517,90	89.221,41	96.053,67	103.829,56	8.10
Jasa Perusahaan	3.359,45	3.530,49	3.731,57	3.974,12	6.50
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	413.595,44	441.634,04	475.607,66	506.188,18	6.43
Jasa Pendidikan	341.292,88	363.963,38	386.309,10	406.984,43	5.35
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61.750,52	62.912,05	64.942,27	66.993,73	3.16
Jasa Lainnya	117.536,54	118.734,10	123.378,22	128.654,81	4.28
PDRB TANPA MIGAS	2.536.430,28	2.658.761,36	2.788.610,95	2.926.285,40	4.94

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2016 Ket : *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi regional dapat diketahui dari angka-angka PDRB atas dasar harga konstan 2000, karena dengan PDRB ini ekonomi tidak lagi dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga tetapi semata-mata kenaikan produksi secara riil. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Flores Timur dari Tahun 2010 bertumbuh dari 4,24 persen menjadi 4,94 persen pada tahun 2015, seperti terlihat dalam Tabel 1.5 dibawah ini.

Tabek 1.5 . PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 – 2015

TAHUN	FLORES TIMUR	
	PDRB (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2010	2.324.444,5	4,24
2011	2.429.252,8	4,51
2012	2.536.430,28	4,41
2013	2.658.761,36	4,86
2014*	2.788.610,95	4,88
2015**)	2.926.285,40	4,94

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2015 Ket : *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2014, sektor yang pertumbuhannya terbesar adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas, pertumbuhan sektor ini mengalami kenaikan yang signifikan dari 4,62 persen pada tahun 2010 menjadi 9,18 persen di tahun 2015, seperti terlihat dalam Tabel 1.6 dibawah ini.

Tabel 1.6 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Tahun 2010 – 2015

SEKTOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,05	1,92	3,65	2,88	2,75	3.35
Pertambangan dan Penggalian	9,57	6,14	8,62	9,09	8,18	8.63
Industri Pengolahan	8,77	7,23	7,24	5,32	5,13	5.92
Pengadaan Listrik dan Gas	4,62	9,11	5,07	8,09	10,57	9.18
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,4	9,07	1,82	7,80	2,99	4.20
Konstruksi	1,76	7,66	4,27	4,17	4,71	4.38
Perdagangan, Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,80	6,68	4,98	5,35	3,71	4.70
Transportasi dan Pergudangan	2,62	4,59	4,79	4,41	6,01	5.13
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,52	3,11	4,65	5,20	3,78	4.55
Informasi dan Komunikasi	12,87	1,54	5,57	5,67	4,92	5.39
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,28	9,81	9,30	8,29	5,98	6.28
Real Estate	7,08	5,52	5,34	6,83	8,78	8.10
Jasa Perusahaan	0,76	7,87	8,71	5,09	5,70	6.50
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,66	7,37	4,82	6,78	7,69	6.43
Jasa Pendidikan	5,95	3,55	3,27	6,64	6,14	5.35
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,64	3,78	4,37	1,88	3,23	3.16
Jasa Lainnya	2,79	4,45	2,31	1,02	3,91	4.28
TOTAL	4,24	4,51	4,41	4,86	4,88	4,94

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2015

2.3 Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

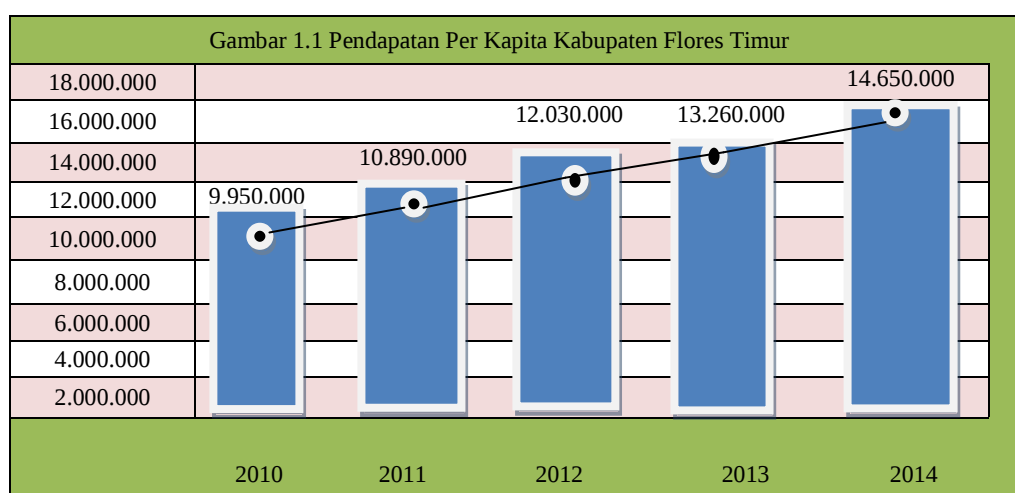
Perkembangan pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Flores Timur setiap tahun menunjukkan peningkatannya yang cukup signifikan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apalagi bersamaan dengan peningkatan pendapatan per kapita, Pemerintah memberikan berbagai subsidi kepada masyarakat sehingga turut serta mendorong kesejahteraan. Rata-rata pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Flores Timur tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel 1.7

Tabel 1.7 Rata-rata Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten Flores Timur
Tahun 2010 – 2014

TAHUN	FLORES TIMUR	
	Pendapatan perkapita (Rp)	% Perubahan
2010	9.950.000	9,62
2011	10.890.000	9,45
2012	12.030.000	10,47
2013	13.260.000	10,22
2014	14.650.000	10,48

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2015

Keterangan : *) angka Sementara **) Angka Sangat Sementara



Peningkatan pendapatan per kapita tersebut mengindikasikan adanya peningkatan daya beli masyarakat. Laju pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 10,04 % per tahun dalam kurun waktu 2010-2014 tergolong laju

pertumbuhan yang cukup tinggi. Walaupun tingkat inflasi berfluktuasi pada periode tersebut, tingkat pertumbuhan tersebut relatif berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

2.4 Laju Inflasi

Tingkat Inflasi PDRB digambarkan oleh perubahan Indeks Harga Implisit (IHI) dari suatu periode/tahun sebelumnya. IHI ini merupakan perbandingan antara PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada periode yang sama. Oleh karena itu IHI lebih menggambarkan perubahan harga yang menyeluruh dari semua kegiatan ekonomi karena inflasi yang digambarkan oleh perubahan IHI ini sudah diwakili oleh semua jenis indeks harga seperti Indeks Harga Konsumen (IHK) ataupun Indeks Harga Sembilan Bahan Pokok (IH9BP). Alasannya karena IHI PDRB ini telah menggambarkan inflasi dari semua jenis harga yaitu Harga Produsen, Konsumen, Perdagangan besar dan jenis harga lainnya, sesuai sistem yang diberlakukan dalam menilai setiap produksi.

Fluktuatifnya laju inflasi Kabupaten Flores Timur selain oleh penyebab-penyebab regional juga dipengaruhi oleh perekonomian nasional antara lain seperti adanya perubahan standar harga terhadap barang atau jasa yang penetapan harganya dilakukan oleh Pemerintah (*administrative price*).

Sedangkan kejadian lokal yang turut serta mempengaruhi inflasi adalah antara lain pengaruh musim atau cuaca yang menyebabkan tidak lancarnya distribusi barang, peringatan hari-hari besar keagamaan dan tahun ajaran baru. Pada periode-periode tersebut terdapat kenaikan harga barang yang disebabkan oleh keterbatasan jumlah barang yang dibutuhkan masyarakat sehingga sesuai dengan hukum ekonomi maka kenaikan permintaan akan diikuti dengan kenaikan harga barang. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas inflasi adalah dengan menjaga tingkat konsumsi masyarakat dan Pemerintah melalui peningkatan perdagangan dalam negeri dan peningkatan inventansi.

Selain itu, stabilnya tingkat konsumsi masyarakat terutama terhadap barang produksi lokal berdampak pada berkembangnya sektor riil yang dijalankan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peranan yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan

mempertahankan laju inflasi. Hal ini karena arus perdagangan di Flores Timur masih didominasi oleh perdagangan kecil dan menengah yang menyerap tenaga kerja cukup signifikan.

Tabel 1.8. Rata-rata Perubahan Pertahun Indeks harga Implisit (IHI) PDRB Tahun 2010-2014

TAHUN	IHI	PERUBAHAN
2010	100,00	6,99
2011	106,04	6,04
2012	113,47	7,00
2013 *)	120,41	6,12
2014 **)	128,29	6,54

Sumber : BPS Kab. Flores Timur, 2015

Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka sangat sementara

2.5 Ketenagakerjaan

Berdasarkan jenis kegiatan, penduduk berumur 15 tahun ke atas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah mereka yang bekerja atau melakukan kegiatan ekonomi, sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang tidak melakukan kegiatan ekonomi karena sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya, seperti pensiun, usia tua, sakit, cacat dan sebagainya.

Tabel. 1.9 Prosentase Penduduk Flores Timur Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin tahun 2015

NO	Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	L + P
1.	Angkatan Kerja	64 046	58 945	122 991
	• Bekerja	61 643	56 556	118 199
	• Pengangguran Terbuka	2 403	2 389	4 792
2.	Bukan Angkatan Kerja	11 755	30 076	41 831
	• Sekolah	5 722	6 263	11 985
	• Mengurus Rumah Tangga	749	21 276	22 025
	• Lainnya	5 284	2 537	7 821
FLORES TIMUR		75 801	89 021	164 822

Sumber : BPS Kabuapten Flores Timur 2016

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa selama tahun 2015 prosentase penduduk menurut kategori angkatan kerja di Kabupaten Flores Timur sebanyak

122.991 yang terdiri dari sebanyak 118.199 di antaranya bekerja sedangkan sisanya 4.792 adalah pengangguran terbuka.

2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah indeks komposit dari gabungan 3 (tiga) indikator, yaitu Usia Harapan Hidup (UHH), Angka Melek Huruf (AMH) serta rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Tinggi rendahnya angka Usia harapan Hidup (UHH) menggambarkan tinggi rendahnya taraf hidup suatu daerah. Semakin tinggi angka harapan hidup di suatu daerah maka kondisi kesehatan di daerah tersebut akan semakin baik pula. Sampai dengan tahun 2015, usia harapan hidup orang Flores Timur 61,24 tahun. Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain se-NTT, Flores Timur termasuk 6 dari Kabupaten/Kota yang UHHnya di atas rata-rata NTT. Hal ini menunjukkan dampak dari keberhasilan pembangunan di Bidang Kesehatan dan bidang-bidang pendukung lainnya. IPM mengukur secara spesifik pencapaian masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi untuk mencapai dan mempertahankan standar kehidupan yang layak. IPM Kabupaten Flores Timur sejak tahun 2009 berada di atas rata-rata IPM Kabupaten/Kota di NTT, namun masih di bawah rata-rata nasional. Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, terutama adanya kendala anggaran, maka upaya meningkatkan IPM tidak dilakukan secara cepat. Sampai dengan tahun 2015, IPM Flores Timur baru mencapai 61,24. Walaupun demikian bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain, perkembangan IPM Flores Timur tergolong cukup baik.

3. Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu-isu Strategis

a. Permasalahan

Permasalahan di Kabupaten Flores Timur berdasarkan kajian pada awal periode RPJMD Tahap II Tahun 2012-2016 dapat dilihat dari beberapa aspek yang meliputi:

1. Permasalahan pada aspek geografis.

Pada aspek geografis permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Flores Timur adalah:

- a. Secara geografis, Kabupaten Flores Timur merupakan daerah yang rawan bencana alam;

- b. Sebagai Kabupaten kepulauan Flores Timur belum memiliki samara dan prasarana perhubungan darat laut dan udara yang memadai untuk mendukung mobilitas orang, barang dan jasa.
 - c. Potensi lahan basah dan lahan kering belum dimanfaatkan secara optimal;
 - d. Potensi laut belum dimanfaatkan secara optimal.
 - e. Keindahan garis pantai memiliki potensi pariwisata belum dikelola secara optimal.
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.
- Gambaran tentang kesejahteraan masyarakat Flores Timur, dengan fokus uraian tentang pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga, menampilkan sejumlah permasalahan pembangunan sebagai berikut:
- a. Sektor pengadaan listrik dan gas adalah pemberi kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB.
 - b. IPM Kabupaten Flores Timur pada tahun 2007 sebesar 66,74, 2008 sebesar 67,34 dan 2009 sebesar 67,77 berada di atas rata-rata IPM kabupaten/kota di NTT, namun secara nasional, IPM NTT berada pada urutan 31 dari 33 Propinsi di Indonesia. Berdasarkan perbandingan IPM secara Nasional tersebut, maka kualitas SDM NTT, termasuk SDM Flores Timur sesungguhnya masih sangat rendah. Kondisi ini merupakan konsekuensi logis dari rendahnya kualitas SDM dan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan, serta di bidang ekonomi berkaitan dengan kualitas SDM tani dan nelayan dalam meningkatkan produktivitas pertanian berdasarkan potensi-potensi lokal, sehingga berdampak pada rendahnya pendapatan per kapita masyarakat.
 - c. Angka kemiskinan di Kabupaten Flores Timur tergolong tinggi. Jumlah penduduk dengan kategori sangat miskin dan miskin masih cukup besar. Jumlah penduduk miskin Flores Timur tahun 2009 sebesar 24.840 orang dan tahun 2010 sebesar 22.400 orang. Sedangkan angkatan kerja Flores Timur yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran terbuka) tahun 2010 sebesar 4.048 orang

atau 1,74% dari total penduduk Flores Timur, dan 3,87% dari total angkatan kerja Flores Timur sebesar 104.551 orang, yang secara implisit menggambarkan jumlah angka pengangguran kabupaten Flores Timur tahun 2010.

- d. Ketidakberdayaan masyarakat miskin, KAT dan PMKS lainnya sehingga kurang berkesempatan untuk mengakumulasi modal produktif, sumber-sumber keuangan, modal sosial dan sarana fisik, Rendahnya kontribusi lembaga kesejahteraan sosial dalam membantu penanganan masalah sosial di masyarakat, Rendahnya kualitas tenaga kerja, tidak adanya akses terhadap lapangan kerja sehingga masih tingginya angka pengangguran dan rendahnya kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI serta penyebaran penduduk yang belum merata di mana masih ada penduduk yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau.
- e. Di bidang olahraga, prasarana dan sarana olahraga masih sangat terbatas. Lapangan olahraga yang tersedia merupakan swadaya masyarakat dan belum memenuhi standar nasional. Sementara pemerintah daerah baru memiliki gedung olahraga sebanyak 1 buah, lapangan volley sebanyak 3 buah. Pengembangan bakat dan prestasi dilaksanakan melalui berbagai kegiatan baik pada tingkat lokal, regional maupun nasional.

3. Aspek Pelayanan Umum.

Aspek Pelayanan Umum meliputi dua fokus utama yaitu fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan gambaran umum kondisi Flores Timur pada awal periode RPJMD pada aspek Pelayanan Umum terdapat beberapa permasalahan pembangunan sebagai berikut:

- a. Rendahnya kualitas pendidikan proses dan output=(manajemen pendidikan yang belum profesional, rendahnya mutu guru dan rendahnya partisipasi masyarakat serta relevansi pendidikan dengan dunia kerja). Sebagian besar tenaga kependidikan belum memiliki kelayakan. Jumlah guru untuk SD/MI sebanyak 2.349 orang dan yang telah memiliki standar kualifikasi minimal D2 hanya sebanyak 424 orang atau 18,05%, untuk SMP/MTs jumlah guru

sebanyak 628 orang dan yang berpendidikan D3 hanya 14 orang atau 22,77% dan sarjana sebanyak 134 orang atau 21,22%. Masih banyak gedung sekolah dari TK hingga SLTA dalam kondisi rusak berat, sedang dan ringan. Bahkan sekitar 30% lebih gedung dalam kondisi rusak berat. Selain itu pula, ruang kelas yang ada pun masih dirasakan kurang serta minimnya fasilitas layanan pendidikan lainnya, seperti : perpustakaan, lapangan olahraga, ruang kelas, laboratorium dan lain sebagainya. Aksesibilitas penduduk usia sekolah cukup rendah dan belum meratanya kesempatan mengikuti pendidikan, dimana masih ada kesenjangan partisipasi pendidikan di kota dan desa khususnya di daerah terpencil. Hal tersebut dapat dilihat dari APS dan APK pada setiap jenjang pendidikan yang masih dibawah 100% bahkan semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah angka partisipasinya.

- b. Akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas belum memadai terutama bagi masyarakat miskin karena belum seimbangnya ratio antara fasilitas kesehatan dengan jumlah penduduk. Kabupaten Flores Timur memiliki Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka, dengan kualifikasi tipe D, dan belum semua Puskesmas dan jaringannya memiliki dukungan sarana-prasarana kesehatan yang memadai. Jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang belum memadai karena belum seimbangnya ratio antara tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), rendahnya gizi balita dan masyarakat terutama masyarakat miskin, dan masih tingginya penyebaran penyakit menular : malaria, diare dan ispa. Belum optimalnya penyediaan obat-obat perbekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan dan keamanan pangan serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang belum menjadi budaya dalam masyarakat baik karena faktor sosial ekonomi maupun karena kurangnya pengetahuan. Masih tingginya pertumbuhan penduduk serta masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang KB yang berdampak kurangnya jumlah peserta/akseptor KB maupun akses terhadap fasilitas KB.
- c. Infrastruktur transportasi wilayah di Flores Timur hingga akhir tahun 2010 masih belum memadai yang ditunjukkan, sebagai berikut: (1) Transportasi darat, antara lain : rendahnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan, rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastuktur jaringan jalan,

kurangnya ketersediaan dan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas, belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran moda transportasi, dan jumlah pergerakan yang terjadi khususnya di Daratan Flores bagian Timur, Daratan Adonara dan Solor belum terakomodasikan dengan optimal; (2) Transportasi udara, antara lain: keberadaan bandar udara Gewayan Tanah belum memadai untuk menampung demand (penumpang dan barang) baik domestik maupun Regional; dan (3) Transportasi laut, antara lain: kondisi fisik pelabuhan dan fasilitas kurang memadai serta adanya keterbatasan pengembangan karena kondisi alam yang tidak mendukung.

Permasalahan pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, antara lain: (1) Potensi sumber daya air di Flores Timur yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan domestik; (2) Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai; (3) Bencana banjir dan kekeringan juga masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan dan (4) Kondisi jaringan irigasi juga belum memadai mengingat sebagian besar jaringan irigasi dalam kondisi rusak berat dan ringan.

Permasalahan pada aspek infrastruktur listrik dan energi adalah (1) sebagian besar desa di Flores Timur belum mendapatkan aliran listrik yang bersumber dari PLN. (2) Penyediaan sumber-sumber energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Surya masih sangat terbatas, sedangkan potensi energi alternatif lainnya seperti PLT Arus Laut masih dalam taraf uji coba, dan Panas Bumi di Kecamatan Demon Pagong masih dalam taraf penelitian.

Belum maksimalnya sistem pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, perumahan yang layak, listrik masyarakat dan Belum semua wilayah kecamatan memiliki rencana tata ruang wilayah sehingga menyulitkan dalam penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang

- d. Permasalahan yang masih ada dalam pembangunan Bidang Aparatur antara lain: kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip

organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang proporsional, sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja. Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat. Praktek penyimpangan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang (korupsi) belum teratasi, dan pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Terbaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi juga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja. Sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah belum memiliki SPM dan SOP.

- e. Pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dengan azas-azas pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian laporan kinerja keuangan yang masih pada level Wajar Dengan Pengecualian (WDP), diakibatkan oleh neraca asset yang belum optimal.
- f. Belum berkembangnya sistem kelembagaan ekonomi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat kecil, Masih lemahnya kemampuan berwirausaha& rendahnya akses masyarakat ke input sumber daya ekonomi dan Rendahnya investasi baik PMA maupun PMDN sehingga belum mampu mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi makro dan menggerakkan pertumbuhan sektor riil.
- g. Masih rendahnya produksi komoditi (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, serta kehutanan), Masih banyak lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara maksimal, Masih terjadinya pengeboman ikan, ilegal logging dan penyelundupan hasil hutan dan mutu produk komoditi pertanian pada umumnya masih rendah dan sistem pemasaran belum tertata baik Masih sering terjadinya

- h. Belum optimalnya pelayanan persampahan. Hal ini disebabkan antara lain karena belum tersedianya TPS secara merata dalam Kota Larantuka dan TPA di luar Kota Larantuka sesuai rencana Tata Ruang Wilayah, serta keterbatasan kemampuan, sarana prasarana dan perilaku masyarakat yang belum memiliki pengetahuan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.
- i. Belum efektifnya fungsi dan peran infrastruktur dan suprastruktur politik serta lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dan Sistem pelayanan pemerintah yang belum berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik; Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah serta Masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah dalam memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan serta belum efektifnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan kebijakan kepala daerah;
- j. Belum efektifnya lembaga penyelenggara negara, lembaga politik dan lembaga masyarakat dalam menjamin kepastian, penegakan dan perlindungan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat dan Masih terbatasnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Nasional dan Undang-undang Politik.

Pada aspek Pelayanan umum ini peran Birokrasi Pemerintahan menjadi sangat penting untuk melayani (serve), mengatur (regulate) dan memberdayakan (empower) masyarakat. Oleh karena itu berbagai permasalahan pembangunan pada aspek ini melahirkan sebuah isu strategis utama yaitu Otonomi Daerah yang semakin berdaya dari aspek kelembagaan dan kapasitas anggaran, Perencanaan dan penganggaran yang pro public serta dukungan SDM Aparatur yang berkualitas dan bermoral dalam melaksanakan pelayanan publik. Menyadari sentralnya peran Birokrasi Pemerintahan dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka isu-isu strategis pembangunan dari dua aspek terdahulu (Aspek Geografis - Demografis dan aspek kesejahteraan masyarakat), juga merupakan bagian integral dari isu-isu strategis pembangunan daerah pada aspek pelayanan umum ini.

b. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Berdasarkan gambaran umum kondisi Flores Timur dan kritalisasi permasalahan pembangunan daerah dari empat aspek utama, sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka isu-isu strategis pembangunan Flores Timur tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut :

1. Otonomi Daerah yang semakin berdaya dari aspek kelembagaan dan kapasitas anggaran, perencanaan dan penganggaran yang *pro public* serta dukungan SDM aparatur yang berkualitas dan bermoral dalam melaksanakan pelayanan public;
2. Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
3. Aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat, PHBS dan Lingkungan Sehat;
4. Peran pemuda dalam pembangunan, kesetaraan gender dan perlindungan terhadap anak;
5. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah;
6. Kesiagaan penanganan bencana alam, pengendalian pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
7. Penanganan kemiskinan melalui gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
8. Revitalisasi pertanian dan koperasi usaha mikro kecil dan menengah;
9. Perikanan dan kelautan menjadi sektor unggulan daerah;
10. Apresiasi dan pengembangan kekayaan dan keragaman budaya daerah serta pengembangan Pariwisata daerah sebagai pemicu tumbuh-kembangnya sektor riil.

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai salah satu Kabupaten Kepulauan dalam wilayah NKRI menjalankan fungsi dan sistem pemerintahan seperti pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Melalui fungsi-fungsi itu Pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama semua pemangku kepentingan terus mengupayakan *Good Governance* dalam menjalankan roda pemerintahan yang berorientasi kepada hasil pembangunan yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan masyarakat.

Selaras dengan itu, Pemerintah Kabupaten Flores Timur menjalankan tugas-tugas pokok pemerintahan yang didistribusikan melalui SKPD teknis. Tugas pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan semua kebutuhan dasar bagi masyarakat.

Pendidikan yang memadai, akses pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Sandang, Pangan dan Papan selalu tersedia dan senantiasa dikelola secara baik sehingga setiap individu dan masyarakat dapat memilikinya agar dapat hidup secara layak dan beradab,

2. Mewujudkan masyarakat secara sehat jasmani dan rohani.

Kondisi yang sehat bagi masyarakat adalah merupakan modal penting bagi pembangunan jati diri manusia seutuhnya,

3. Mencerdaskan masyarakat melalui penyediaan akses pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam konteks ini adalah menjadi kewajiban Pemerintah untuk memfasilitasi dan mendorong semua individu untuk berperan dan berpartisipasi dalam pendidikan dan menguasai teknologi, ketrampilan sehingga dapat terus maju dan dapat bersaing pada tataran yang lebih tinggi,

4. Membangun infrastruktur sebagai salah satu akses penting dan vital bagi masyarakat dalam berkomunikasi dan berusaha, yang diwujudkan melalui pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, pasar, irigasi dan sebagainya,

5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum sehingga konflik horisontal antar masyarakat dapat dihindari. Kondisi yang nyaman dan aman adalah merupakan prasyarat umum bagi terselenggaranya seluruh aktifitas masyarakat dan pemerintahan.

Fungsi-fungsi dan tugas pokok pemerintahan di atas dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dijabarkan secara lebih rinci dalam Peraturan Bupati Flores Timur tentang Uraian Tugas masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada tahun 2015 Pemerintahan Kabupaten Flores Timur terdiri dari 28 SKPD yakni Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan sebagaimana tersebut di atas.

5. Srtuktur Organisasi

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan adanya kebijakan politik dalam melakukan restrukturisasi birokrasi termasuk penataan kelembagaan perangkat daerah. Pada prinsipnya penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Flores Timur berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur, antara lain :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2011, yang terdiri dari :
 1. Sekretariat Daerah :
 - a. Sekretaris Daerah
 - b. 3 (tiga) Asisten Sekretaris Daerah
 - c. 10 (sepuluh) Bagian
 2. Sekretariat DPRD :
 - a. Sekretaris DPRD
 - b. 4 (empat) Bagian
 - c. 9 (sembilan) Sub Bagian

2. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan;
 2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 3. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 5. Dinas Kesehatan;
 6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 8. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi;
 9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
 13. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2011 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 001 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
 1. Inspektorat;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Kepegawaian Daerah;
 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 5. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 7. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
 8. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
 9. Badan Lingkungan Hidup Daerah;

10. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
11. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
12. Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.3 Sistematika Penyajian LKIP

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Kondisi Geografis, Data Demografi dan Kondisi Ekonomi Daerah. Bab I juga berisi Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah serta Sistematika penyajian LKIP Kabupaten Flores Timur.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Memuat Rencana Strategis Daerah yang meliputi Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Kinerja dalam Ringkasan RPJMD Tahun 2012-2016 serta Agenda Pembangunan Daerah. Pada Bab ini juga disajikan Program dan Pencapaian Sasaran sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab ini, disajikan capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran dengan membandingkan realisasi kinerja tahun ini dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Flores Timur. Dalam Bab ini juga disajikan analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan serta Capaian kinerja keuangan daerah dengan menyajikan realisasi anggaran per bidang urusan.

BAB IV PENUTUP

Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja dan pemanfaatannya dalam rangka *feed back* dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 adalah :

1. Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016;
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2012-2016;
3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran;
4. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama;
5. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan lima tahun berjalan dengan target kinerja (lima) tahunan yang direncanakan